



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
JAWA TENGAH

JL. JEND. SOEDIRMAN NO. 81, KOTA SEMARANG 50141
TELEPON / FAXMILE : (024) 76434711 CALL CENTRE : 082322214477

WEBSITE : <https://karantinaindonesia.go.id/jawatengah>

EMAIL : karantinajateng@karantinaindonesia.go.id

Yth.,
Kepala Badan Karantina Indonesia
di
Jakarta

5 Februari 2025

SURAT PENGANTAR
NOMOR: B-1076/RC.320/JJ.13/02/2025

No	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Tahunan TA 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah.	Tiga Berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk memberikan informasi kinerja yang terukur juga menjadi upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Kepala Balai,

Sokhib



LAPORAN KINERJA 2024

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2024, Badan Karantina Indonesia ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja instansi Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada *stakeholder* terkait serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi. Kinerja diukur atas dasar penilaian Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2024. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah periode mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Semarang, 31 Januari 2025

Kepala Balai,



Sokhib

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi	9
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Kebijakan dan Program	18
C. Sasaran Kegiatan	19
D. Perjanjian Kinerja	20
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Upaya Peningkatan Kinerja	76

Daftar Tabel

TABEL 1 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN TA. 2024	1
TABEL 2 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BALAI KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024.....	21
TABEL 3 DATA PENGHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR eKINERJA BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024	25
TABEL 4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	26
TABEL 5 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 1 TA. 2024	28
TABEL 6 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	29
TABEL 7 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 2 TA. 2024	32
TABEL 8 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	33
TABEL 9 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 3 TA. 2024	37
TABEL 10 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	38
TABEL 11 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 4	42
TABEL 12 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	42
TABEL 13 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 5	46
TABEL 14 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	47
TABEL 15 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 6	50
TABEL 16 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	51
TABEL 17 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 7	54
TABEL 18 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	55
TABEL 19 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 8	58
TABEL 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	58
TABEL 21 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU. 9	61
TABEL 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN 2024	61
TABEL 23 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 10	64
TABEL 24 PERBANDINGAN PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 10	66
TABEL 25 NILAI AKUTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	68
TABEL 26 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	69
TABEL 27 REALISASI ANGGARAN BELANJA TA 2024	71
TABEL 28 REALISASI ANGGARAN BELANJA PER RINCIAN OUTPUT 2024.....	72

Daftar Gambar

GAMBAR 1 CAPAIAN KINERJA BKHIT JAWA TENGAH.....	2
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KARANTINA INDONESIA	7
GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH TAHUN 2024	9

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah yang merupakan institusi mempunyai tugas pokok melaksanakan Sistem Perkarantinaan Pertanian sebagaimana amanah Undang-undang nomor 21 tahun 2019 sekaligus mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Karantina Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen "Menjadi Instansi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan".

Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen. Hal tersebut tertuang dalam Renstra 2024 dengan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi serta persentase capaian indikator kinerja sampai dengan TA.2024 sebagaimana Tabel 1, dengan efisiensi sebesar 68,85 sesuai dengan data dari <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

Tabel 1 Sasaran program, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian TA. 2024

Program Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	20 Jenis	666,67
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	20 Jenis	666,67
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27.525 Sertifikat	34.340 Sertifikat	124,76
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25.356 Sertifikat	26.621 Sertifikat	104,99

2.Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan,Ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60 Dokumen	116 Dokumen	193,33
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	60 Dokumen	138 Dokumen	230,00
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	100
3.Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi	151 Publikasi	5.033,33
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	84,88 Nilai	104,79
4.Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	81 Nilai	94,46 Nilai	116,62
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan,anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	88,05 Nilai	108,70

.Gambar 1 Capaian Kinerja BKHIT Jawa Tengah.

Capaian Kinerja Tahun 2024

Belai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah (Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah)

TW-1		TW-2		s/d TW-2		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress
85.40%	29.30%	104.65%	233.09%	85.14%	313.00%	112.16%	678.62%	94.67%	1006.52%	111.78%	702.85%	115.51%	2439.15%

Berdasarkan capaian sasaran dan indikator kinerja menunjukkan bahwa semua indikator kinerja utama (IKU) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah sudah tercapai dan bahkan beberapa indikator melebihi target yang

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian eKinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah masuk kategori SANGAT BAIK. Oleh karena itu capaian kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas / produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (trade tools) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive

(invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantina, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia. Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

Tugas Badan Karantina Indonesia

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi

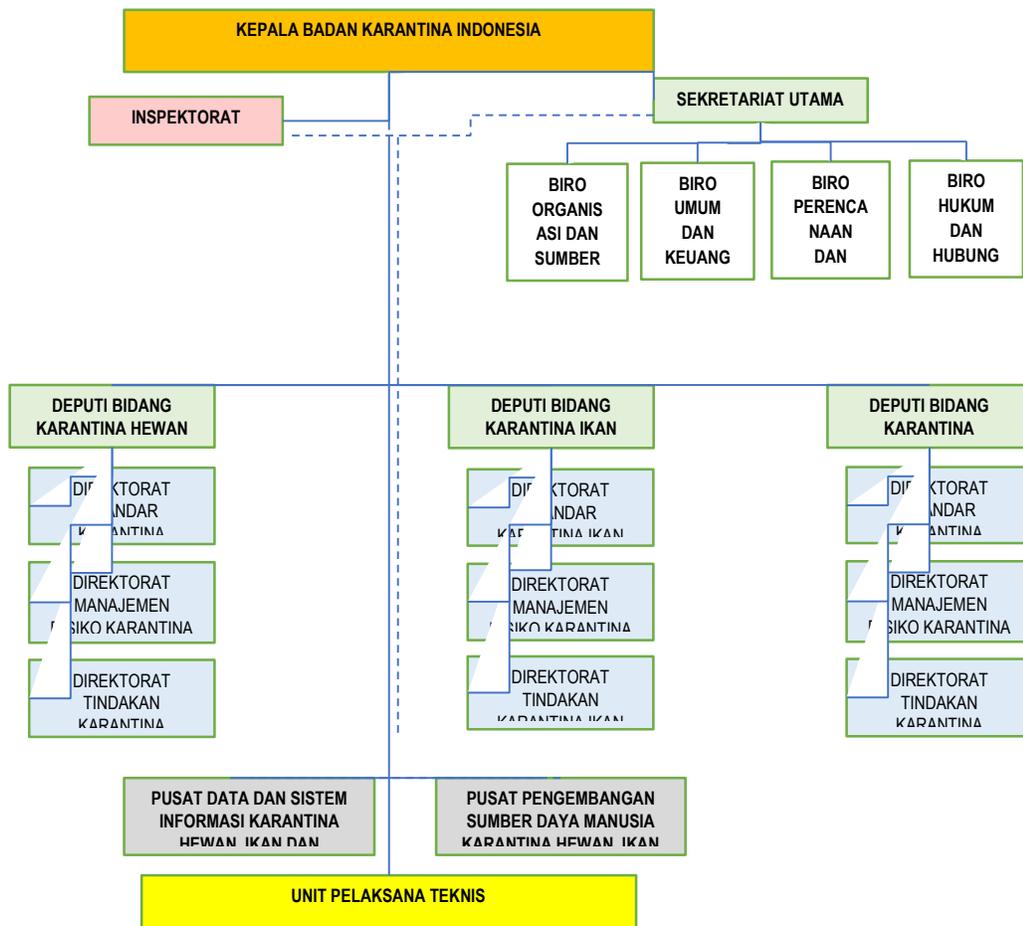
1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;

5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.

Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia



B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Undang-Undang yang baru No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengamankan tugas dan kewenangan karantina yang lebih luas. Tidak hanya mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tetapi juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedudukan, tugas dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah di bawah Badan Karantina Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

2. Tugas

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan lalulintas keamanan hayati hewani dan nabati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK, HPIK dan OPTK
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK dan OPTK Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- g. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi

Berikut Stuktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3 Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi, dan
- b. peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- c. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- e. Pengentasan kemiskinan; dan
- f. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;

- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).

Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Karantina Indonesia yang mempunyai Visi, Misi dan Kedudukan sebagai berikut:

Visi

Visi Balai karantina hewan ikan dan tumbuhan Jawa Tengah adalah :

“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat“

Misi

Adapun misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah adalah :

1. Menyeleenggarakan sistem perkarantinaan yang horistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun tatakelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedudukan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Terbitnya regulasi Undang-Undang yang baru No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengamanahkan tugas dan kewenangan karantina yang lebih luas. Tidak hanya mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tetapi juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina diperkuat dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2019. Di mana Pejabat Karantina melaksanakan tugasnya meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Rangkaian tindakan karantina tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama penyakit yang dapat merugikan baik secara sosial maupun ekonomi.

Pada Tahun 2023 terbit Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini, Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan membantu meningkatkan perdagangan internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global. Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan. Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Adapun Tugas, Fungsi dan Tujuannya sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Fungsi

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;

3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi misi tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mencegah masuknya HPHK, HPIK dan OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasive dan PRG yang mengganggu Kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan; dan
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Tujuan dan Sasaran

Dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi merupakan rumusan umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan merupakan penjabaran visi yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka menengah. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dan indikator kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di badan karantina indonesia, tahun 2023 dilaksanakan transformasi jabatan menjadi jabatan fungsional. Dengan perombakan struktur tersebut membawa konsekuensi perubahan Renstra badan karantina indonesia yang diikuti dengan perubahan Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2020 – 2024. Perubahan Renstra Badan Karantina Indonesia menghasilkan sasaran dan indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah tahun 2021 – 2024 sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah pada Renstra 2021-2024 yaitu:
 - 1) Terkendalinya dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien
 - 2) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima
 - 3) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
- b. Indikator Kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra 2021 – 2024 yaitu:
 - 1) Persentase tindak lanjut terhadap temuan HPHK, HPIK dan OPTK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

- 2) Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan arantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
- 3) Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
- 4) Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas produk yang di lalulintaskan
- 5) Nilai PMPRB Badan Karantina Indonesia
- 6) Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia

B. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden serta wakil presiden Berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya.

1. Kebijakan Operasional Perkarantinaan

Dukungan kebijakan dan program Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, yaitu:

- a. Mencegah masuknya HPHK, HPIK dan OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu;

- e. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasive dan Produk Rekayasa Genetik yang mengganggu Kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan; dan
- f. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta Sumber Daya Genetik dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Program dan Kegiatan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah mempunyai dua program dengan masing-masing satu kegiatan yaitu:

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Penyelenggaraan Karantina Pertanian.
- b. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah yang didukung Badan Karantina Indonesia yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan 1. Terkendalinya dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK dan keamanan hayati dengan indikator berupa jumlah tindak lanjut terhadap temuan HPHK, HPIK dan OPTK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

- b. Sasaran Kegiatan 2. Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator berupa jumlah komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, Jumlah komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan serta Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian
- c. Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator berupa Nilai PMPRB Badan Karantina Indonesia
- d. Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah.

Perubahan Sasaran, indikator eKinerja dan target secara rinci dapat dilihat pada Renstra 2024 yang berlaku tahun 2020 sebagaimana dan Renstra 2020 – 2024 sebagaimana terlampir.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat target kinerja BKHIT Jawa Tengah tahun 2024 sebagaimana Tabel 2. Perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kepala BKHIT Jawa Tengah tahun 2024

Program Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27.525 Sertifikat
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25.356 Sertifikat
2. Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60 Dokumen
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	60 Dokumen
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	81 Nilai
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp. 27.580.633.000
2. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp. 8.821.014.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 36.401.647.000

Dari pagu anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah pada TA 2024 sebesar **Rp. 36.401.647.000**, dapat direalisasikan sebesar **Rp. 35.888.025.609** atau 98,59 % dari pagu anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp. 513.621.391 yaitu akumulasi dari sisa anggaran dari Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003) sebesar Rp. 504.331.560 dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999) sebesar Rp. 9.289.831.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah adalah sebagai berikut Tahun 2024 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja,
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan setiap capaian sasaran dan indikator kinerja ditentukan dengan Persentase pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---------------|
| A. Sangat Baik | : > 90 - 100% |
| B. Baik | : > 85 - 90 % |
| C. Cukup | : > 75 - 85 % |
| D. Kurang | : > 50 - 75 % |
| E. Buruk | : > 0 - 50 % |

Apabila terdapat capaian yang sangat melampaui target atau lebih dari 120% dari target, dinyatakan dalam data anomali yaitu 120%*), Angka ini merupakan salah satu kriteria yang disepakati dalam PMK 22/2021 Jo, 249/2011 Jo, 214/2017.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui perhitungan capaian Indikator kinerja, Data perhitungan capaian indikator kinerja tersebut bersumber dari aplikasi basis data kegiatan operasional Karantina Pertanian yang tersedia pada aplikasi *Best Trust* maupun laporan dari Pusat Karantina Indonesia dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, serta Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang memuat:

1. Data operasional perkarantinaan baik pemeriksaan, pembebasan, penolakan, pemusnahan pada lalulintas komoditas pertanian impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar;
2. Data temuan HPHK, HPIK dan OPTK dan ketidaksesuaian keamanan hayati di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan;
3. Data pemberitahuan penolakan dan pemusnahan atas komoditas pertanian Indonesia yang di sertifikasi karantina ekspor;
4. Pemberitahuan ketidak sesuaian terkait keamanan pangan ke negara asal komoditas;
5. Data penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan sampai dengan P21;
6. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia;
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tahun 2024, berdasarkan data sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 Data Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2024

NO	Parameter	Jumlah
1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	20 Jenis
2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	20 Jenis
3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	34.340 Sertifikat
4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	26.621 Sertifikat
5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	116 Dokumen
6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	138 Dokumen
7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	151 Publikasi
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,88 Nilai
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	94,46 Nilai
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88,05 Nilai

Keterangan:

1. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti merupakan kegiatan (Pemantauan) tahun 2024;
2. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat Pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindaklanjuti pada pemeriksaan karantina tahun 2024;
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Domestik Masuk, Domestik Keluar dan Impor) tahun 2024;
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Ekspor) pada tahun 2024;
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain);

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain);
7. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perkarantinaan merupakan kasus pro-justisi pada saat importasi komoditas pertanian, hewan dan ikan , terjadi di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, ditangani oleh PPNS Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah mencapai P-21;
8. Jumlah publikasi tentang Kegiatan Karantina Yang di media ataupun Media sosial tentang informasi perkarantinaan kepada masyarakat;
9. Nilai IKM Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah merupakan nilai pengisian kuisisioner IKM oleh pengguna jasa;
10. Nilai Kinerja Keuangan berasal dari Aplikasi OMSPAN / SMART MONEV KEMENKEU pada tahun 2024;
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari penilaian Inspektorat Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi, perhitungan dan analisis capaian indikator eKinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah tahun 2024 didapatkan hasil sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja

Program Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	20 Jenis	666,67
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	20 Jenis	666,67
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27.525 Sertifikat	34.340 Sertifikat	124,76
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25.356 Sertifikat	26.621 Sertifikat	104,99
2.Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60 Dokumen	116 Dokumen	193,33

hewan, ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	60 Dokumen	138 Dokumen	230,00
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	100
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	3 Publikasi	151 Publikasi	5.033,33
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	84,88 Nilai	104,79
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	81 Nilai	94,46 Nilai	116,62
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	88,05 Nilai	108,70

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pengukuran capaian sasaran program tersebut berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah dengan perbandingan target dan realisasi tahun ini sebagai berikut:

1) IKU 1. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK termasuk media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan atau pakan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pada pangan dan pakan pada kegiatan pemantauan, maka keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK serta keberadaan cemaran pangan dan pakan di wilayah Indonesia dapat dideteksi secara dini, sehingga dapat dilakukan

Tindakan cepat sedini mungkin untuk mencegah penyebarannya di wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, dalam menilai sejauh mana HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan dan pakan dapat dicegah masuk dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia, atau lolos dari pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga digunakan sebagai bahan informasi dan justifikasi ilmiah dalam penentuan daerah sebar yang sebenarnya dari HPHK, HPIK dan OPTK di wilayah Indonesia.

Cara Menghitung:

Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan atau pakan hasil pemantauan atau monitoring. Satuan Pengukuran: Jenis HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan atau pakan yang ditemukan. Berdasarkan data sebagaimana Tabel 5 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Perkembangan Capaian IKU 1 TA. 2024

Indikator Kinerja	Target (Jenis)	Realisasi (Jenis)	%
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	20	666,67

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data tabel 5 tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di dalam wilayah Indonesia yang berhasil ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024, target awal yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3 kasus temuan yang ditindaklanjuti. Namun, realisasi yang dicapai jauh melampaui target, dengan total 20 temuan yang berhasil ditindaklanjuti, atau mencapai 666,67% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan tindakan karantina yang semakin optimal dalam mendeteksi serta menangani ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan. Peningkatan yang signifikan ini juga dapat diindikasikan sebagai hasil dari strategi penguatan monitoring, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas sumber daya di bidang karantina.

Ke depan, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan ini serta langkah-langkah yang perlu diambil guna memastikan efektivitas tindakan karantina tetap terjaga dan semakin meningkat.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 6 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Jenis)	Realisasi Tahun 2024 (Jenis)	Capaian (%)
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	N/A	20	666,67

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, jumlah temuan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti belum tersedia (N/A) karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia. Namun, pada tahun 2024, realisasi mencapai 20 temuan, dengan tingkat capaian 666,67% dibandingkan dengan target.

Analisis Per Divisi

1. Realisasi Capaian KH (Karantina Hewan)

Pada tahun 2024, HPHK yang ditemukan dan ditindaklanjuti berjumlah 4 jenis. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan sistem pemantauan kesehatan hewan yang lebih ketat serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas

peternakan dan kepolisian. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemeriksaan klinis lebih ketat di tempat pemasukan dan pengeluaran, serta penguatan pengawasan di daerah rawan masuknya penyakit hewan.

2. Realisasi Capaian KI (Karantina Ikan)

Pada sektor HPIK, terdapat 7 temuan yang berhasil ditindaklanjuti. Peningkatan ini dikarenakan implementasi teknologi deteksi dini berbasis laboratorium dan pemeriksaan lebih ketat pada lalu lintas ikan antarwilayah. Selain itu, sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi karantina turut meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.

3. Realisasi Capaian KT (Karantina Tumbuhan)

Untuk OPTK, sebanyak 9 temuan berhasil ditindaklanjuti. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh peningkatan pemantauan area pertanian dan perkebunan, serta penerapan sistem pengendalian hama terpadu (IPM). Selain itu, kerja sama dengan petani dan penyuluh pertanian dalam identifikasi dini organisme pengganggu tumbuhan telah mempercepat proses deteksi dan tindakan karantina.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi telah memungkinkan deteksi dini dan pemantauan yang lebih akurat terhadap kasus-kasus karantina. Selain itu, penambahan jumlah personel di titik-titik rawan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK turut mempercepat respons terhadap temuan di lapangan. Optimalisasi kerja sama dengan dinas terkait dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan serta penegakan regulasi karantina. Tak kalah penting, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif telah memastikan petugas lebih siap dalam mendeteksi dan menangani berbagai kasus perkarantinaan.

Sebagai langkah perbaikan, beberapa solusi strategis dapat diterapkan ke depan. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan big data akan

mendukung analisis tren penyebaran penyakit dan hama dengan lebih akurat. Selain itu, peningkatan jumlah laboratorium pengujian cepat di berbagai daerah menjadi langkah krusial untuk mempercepat identifikasi kasus. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat serta pelaku usaha juga perlu dilakukan agar mereka dapat berperan aktif dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit serta hama.

- d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa program unggulan yang telah diterapkan. Program Penguatan Pengawasan Perkarantina telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan di titik pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, Program Deteksi Dini HPHK, HPIK, dan OPTK dengan pendekatan berbasis laboratorium dan pemantauan lapangan secara berkala juga menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Tak kalah penting, Program Kolaborasi dengan *stakeholder* yang melibatkan akademisi, petani, peternak, dan nelayan telah membantu dalam mendeteksi serta menangani kasus karantina secara lebih efektif.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kinerja pengawasan dan penanganan HPHK, HPIK, dan OPTK di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional tetapi juga memastikan kelestarian sumber daya hayati Indonesia.

2. IKU 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia melalui Tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan atau pengeluaran, maka HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud dapat terdeteksi, sehingga

dapat dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud di dalam wilayah Indonesia. Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan di tempat pemasukan atau pengeluaran (impor, antar area dan ekspor). Temuan HPHK, HPIK dan OPTK berasal dari kegiatan pemeriksaan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik masuk atau keluar (impor, antar area maupun ekspor).
 Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Sifat perhitungan: Akumulasi Validasi: lag Output
 Berdasarkan data sebagaimana Tabel 7 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7 Perkembangan Capaian IKU 2 TA. 2024

Indikator Kinerja	Target (Jenis)	Realisasi (Jenis)	%
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.	3	20	666,67

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan tabel 7 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang berhasil ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3 temuan yang ditindaklanjuti. Namun, realisasi yang dicapai jauh melampaui target, dengan total 20 temuan yang berhasil ditindaklanjuti, atau mencapai 666,67% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan di titik-titik kritis seperti pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas. Keberhasilan ini juga mengindikasikan bahwa strategi intensifikasi pengawasan, optimalisasi sumber daya, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik.

Untuk kedepannya, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian ini serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan langkah strategis yang tepat, diharapkan kinerja pengawasan dan tindakan karantina dapat terus ditingkatkan guna melindungi sumber daya hayati nasional.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 8 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Jenis)	Realisasi Tahun 2024 (Jenis)	Capaian (%)
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	N/A	20	666,67

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, jumlah temuan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti belum tersedia (N/A) karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia. Keberhasilan dalam menindaklanjuti 20 temuan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang belum memiliki data realisasi. Pencapaian ini mencapai 666,67%, menandakan efektivitas pengawasan dan penanganan karantina yang lebih baik.

Analisis Per Divisi

1. Realisasi Capaian KH (Karantina Hewan)

Pada tahun 2024, terdapat 4 temuan HPHK yang berhasil ditindaklanjuti. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman penyakit hewan yang berpotensi masuk atau menyebar di dalam negeri. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kapasitas laboratorium diagnostik, penguatan pengawasan di titik pemasukan dan pengeluaran, serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Peternakan dan Kementerian Pertanian.

2. Realisasi Capaian KI (Karantina Ikan)

Jumlah temuan HPIK yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 mencapai 7 jenis. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam memperketat pengawasan di pelabuhan perikanan serta jalur distribusi ikan domestik dan internasional. Penggunaan metode pengujian berbasis molekuler di laboratorium telah mempercepat identifikasi penyakit ikan, sehingga tindakan pencegahan dan karantina dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai regulasi karantina ikan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan mitigasi risiko penyebaran penyakit.

3. Realisasi Capaian KT (Karantina Tumbuhan)

Pada sektor karantina tumbuhan, terdapat 9 jenis OPTK yang berhasil ditindaklanjuti di tahun 2024. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penerapan sistem deteksi dini menggunakan teknologi sensor dan analisis laboratorium berbasis DNA untuk mengidentifikasi organisme pengganggu secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, peningkatan inspeksi di titik pemasukan seperti pelabuhan dan bandara, serta kerja sama dengan eksportir dan importir untuk memastikan kepatuhan terhadap standar karantina, telah membantu menekan risiko penyebaran OPTK di dalam negeri.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja dalam penanganan HPHK, HPIK, dan OPTK di tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah penerapan teknologi deteksi dini yang semakin canggih, seperti pemanfaatan sistem berbasis

kecerdasan buatan (AI) dan big data yang membantu dalam menganalisis tren penyebaran penyakit secara lebih presisi. Selain itu, penggunaan alat diagnostik berbasis PCR dan serologi juga mendukung proses identifikasi penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Faktor lain yang berkontribusi adalah peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, di mana pelatihan intensif bagi petugas karantina dalam teknik inspeksi dan deteksi OPTK, HPHK, serta HPIK telah memperkuat pengawasan. Penambahan fasilitas laboratorium di beberapa wilayah strategis juga mempercepat proses identifikasi dan tindakan karantina.

Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik juga menjadi faktor keberhasilan. Kerja sama yang diperkuat dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk akademisi dan sektor swasta, memungkinkan peningkatan pengawasan dan penanganan kasus karantina secara lebih efektif. Selain itu, sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan pelaku usaha turut meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi karantina. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun mendatang, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan, seperti peningkatan penggunaan teknologi pemantauan berbasis sensor dan drone guna mendukung inspeksi di lapangan. Perluasan jejaring kerja sama dengan negara mitra dagang juga perlu dilakukan untuk meningkatkan standar biosekuriti di jalur perdagangan internasional. Selain itu, efektivitas penegakan hukum harus diperkuat guna meminimalkan risiko penyebaran penyakit dan hama akibat pelanggaran karantina.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa program dan kegiatan telah berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian ini. Program peningkatan pengawasan dan deteksi dini telah dilakukan dengan meningkatkan jumlah inspeksi di titik-titik kritis pemasukan dan pengeluaran, serta menggunakan metode identifikasi laboratorium berbasis bioteknologi untuk mempercepat deteksi OPTK, HPHK, dan HPIK. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi karantina juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui seminar, *workshop*, serta kampanye publik, bimbingan teknis. Implementasi sistem peringatan dini berbasis komunitas turut

membantu peternak dan nelayan dalam mendeteksi potensi ancaman penyakit lebih awal. Program penguatan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor pendukung utama, dengan meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam menegakkan aturan karantina serta menerapkan sanksi lebih ketat bagi pelanggar ketentuan perkarantinaan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja pengawasan dan penanganan HPHK, HPIK, serta OPTK dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Keberlanjutan upaya ini akan mendukung ketahanan pangan nasional serta menjaga kelestarian sumber daya hayati Indonesia dari ancaman penyakit dan hama yang dapat berdampak negatif pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

3. IKU 3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam melaksanakan kegiatan perkarantinaan untuk memastikan bahwa komoditas yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) maupun yang dialulintaskan antar area didalam wilayah RI sudah sesuai dengan persyaratan karantina yang direpresentasikan atau dibuktikan dengan sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina impor dan antar area. Temuan HPHK, HPIK dan OPTK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka HPHK, HPIK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini, dan selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK tersebut. Perhitungan capaian indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut:

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 9 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU 3 TA. 2024

Indikator Kinerja	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	%
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27.525	34.340	124,76

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data dari tabel 9 tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 menunjukkan hasil yang sangat baik dalam upaya pembebasan media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 27.525 sertifikat, sementara realisasi yang dicapai mencapai 34.340 sertifikat atau setara dengan 124,76% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam membebaskan media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang signifikan, dengan total realisasi sebanyak 34.340 sertifikat, atau setara dengan 124,76% dari target. Pada tahun 2024, jumlah media pembawa yang berhasil dibebaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total realisasi sebanyak 34.340 sertifikat, atau 124,76% dari target. Capaian ini mencakup sertifikasi impor, serta pergerakan media pembawa dalam negeri, baik domestik masuk maupun domestik keluar. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan sistem karantina yang semakin ketat dalam memastikan keamanan hayati di sektor hewan, ikan, dan tumbuhan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 10 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Sertifikat)	Realisasi Tahun 2024 (Sertifikat)	Capaian (%)
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	N/A	34.340	124,76

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan belum tersedia (N/A) karena karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia. Adanya jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan di tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang belum memiliki data realisasi. Pencapaian ini mencapai 124,76%, menandakan efektivitas pengawasan dan penanganan karantina yang lebih baik.

1. Analisis Realisasi Karantina Hewan (KH)

Pada tahun 2024, realisasi jumlah media pembawa yang dapat dibebaskan di sektor Karantina Hewan (KH) mencatat realisasi 9.677 sertifikat, yang mencerminkan tingginya volume media pembawa yang diawasi dalam skema impor dan distribusi domestik. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi sistem pemantauan berbasis teknologi, penggunaan alat diagnostik modern seperti PCR dan serologi untuk mempercepat deteksi HPHK, serta penguatan prosedur pemeriksaan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, koordinasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, termasuk peternak dan pelaku usaha, berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi karantina hewan. Ke depan, efektivitas sertifikasi dapat lebih ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi perizinan,

penambahan laboratorium pengujian cepat di daerah lalu lintas tinggi, serta sosialisasi lebih luas terkait kebijakan karantina bagi pemangku kepentingan di sektor peternakan.

2. Analisis Realisasi Karantina Ikan (KI)

Realisasi di sektor Karantina Ikan (KI), realisasi sertifikasi mencapai 2.501 sertifikat, yang menunjukkan peran strategis dalam mengawasi pergerakan media pembawa ikan baik dalam perdagangan internasional maupun distribusi domestik. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan jumlah inspeksi di pelabuhan utama, optimalisasi metode uji laboratorium untuk mendeteksi HPIK secara cepat, serta penguatan sinergi dengan nelayan dan eksportir perikanan guna memastikan kepatuhan terhadap standar biosekuriti. Untuk mendukung peningkatan capaian di masa mendatang, langkah yang perlu dilakukan mencakup penerapan sistem monitoring berbasis sensor untuk mendeteksi penyakit ikan secara real-time, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian spesifik untuk komoditas perikanan, serta penguatan penegakan regulasi bagi pelaku usaha yang belum memenuhi standar karantina ikan.

3. Analisis Realisasi Karantina Tumbuhan (KT)

Sektor Karantina Tumbuhan mencatat realisasi tertinggi dengan 22.162 sertifikat, mencerminkan tingginya volume media pembawa tumbuhan yang diawasi dalam skema impor dan distribusi domestik. Keberhasilan ini didorong oleh penerapan teknologi pemantauan berbasis drone dan citra satelit untuk mengidentifikasi potensi penyebaran OPTK lebih awal, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan intensif terkait metode inspeksi dan identifikasi hama, serta penguatan kerja sama dengan eksportir dan importir guna memastikan standar sanitasi dan fitosanitasi terpenuhi. Untuk memperkuat pencapaian ini, perlu dilakukan pengembangan sistem *e-certification* guna mempercepat proses sertifikasi karantina tumbuhan, penambahan laboratorium khusus OPTK di wilayah strategis, serta penguatan regulasi terhadap pelanggaran karantina guna mengurangi risiko penyebaran hama dan penyakit tanaman.

- c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Keberhasilan pencapaian ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Peningkatan kapasitas pengawasan dan pemeriksaan menjadi salah satu faktor kunci, dengan optimalisasi sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat di titik-titik pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, jumlah personel di lapangan juga ditingkatkan, didukung oleh pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi petugas karantina. Digitalisasi dan otomasi layanan karantina turut berperan dalam percepatan proses sertifikasi, di mana sistem digital digunakan dalam pengelolaan dokumen untuk memastikan verifikasi dan validasi yang lebih efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pelacakan dan pemantauan media pembawa juga menjadi solusi efektif dalam memastikan pengendalian karantina berjalan dengan optimal.

Selain itu, kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bea Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta operator pelabuhan dan bandara turut menunjang keberhasilan ini. Sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait prosedur serta pentingnya tindakan karantina juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai langkah alternatif, dilakukan strategi tambahan berupa perbaikan prosedur inspeksi, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data sertifikasi, serta pemantauan secara *real-time* terhadap arus masuk dan keluar media pembawa.

- d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Keberhasilan dalam pencapaian IKU 3 ini tidak terlepas dari beberapa program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan. Program penguatan sistem karantina terintegrasi dengan penerapan layanan satu pintu telah mempermudah proses sertifikasi dan mempercepat pembebasan media pembawa yang memenuhi standar. Selain itu, kegiatan intensifikasi pengawasan di titik-titik kritis seperti pelabuhan, bandara, dan kantor pos telah diperkuat dengan penambahan pos pemeriksaan dan penggunaan peralatan deteksi dini untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan

melalui workshop dan bimbingan teknis juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi karantina.

Dengan kombinasi strategi ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah mampu melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam sistem karantina nasional. Ke depan, evaluasi lebih lanjut akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja dalam pembebasan media pembawa guna mendukung ketahanan hayati dan keamanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah sertifikasi impor serta sertifikasi untuk pergerakan media pembawa domestik masuk dan domestik keluar menunjukkan efektivitas kebijakan karantina dalam memastikan keamanan hayati di berbagai sektor. Keberhasilan ini tidak hanya mengurangi risiko penyebaran hama dan penyakit, tetapi juga mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan capaian di masa mendatang, diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan infrastruktur laboratorium, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum guna memastikan sistem karantina yang lebih efektif dan efisien.

4) IKU 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi karantina dipastikan merupakan komoditas yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat meminimalkan risiko ditolak, re-ekspor atau dimusnahkan di negara tujuan. Penghitungan indikator sebagai berikut:

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU. 4

Indikator Kinerja	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	%
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25.356	26.621	104,99

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 menunjukkan hasil yang positif dalam pengawasan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 25.356 sertifikat, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 26.621 sertifikat atau setara dengan 104,99% dari target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 12 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Sertifikat)	Realisasi Tahun 2024 (Sertifikat)	Capaian (%)
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	N/A	26.621	104,99

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2024, jumlah media pembawa yang melalui tempat pengeluaran dan memenuhi persyaratan karantina mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total realisasi sebanyak 26.621 sertifikat, atau mencapai 104,99% dari target. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem sertifikasi ekspor dalam memastikan bahwa media pembawa yang keluar dari wilayah Indonesia telah memenuhi standar biosekuriti dan kesehatan sesuai regulasi nasional maupun internasional. Pada tahun 2023, Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan belum tersedia (N/A) karena karena masih

dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan sektor karantina, Karantina Hewan (KH) mencatat realisasi 680 sertifikat ekspor, menunjukkan adanya peningkatan pengawasan terhadap komoditas hewan yang diekspor. Peningkatan ini didukung oleh penggunaan teknologi diagnostik modern seperti PCR dan serologi dalam mendeteksi HPHK, serta penguatan prosedur sertifikasi untuk memastikan bahwa hewan dan produk hewan yang diekspor bebas dari penyakit yang berpotensi menular. Selain itu, kerja sama dengan eksportir dan pemangku kepentingan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar karantina hewan. Ke depan, efektivitas sertifikasi ekspor di sektor ini dapat ditingkatkan melalui digitalisasi layanan perizinan ekspor, penambahan laboratorium pengujian cepat di pelabuhan utama, serta sosialisasi regulasi ekspor kepada pelaku usaha peternakan.

Di sektor Karantina Ikan (KI), realisasi sertifikasi ekspor mencapai 5.084 sertifikat, yang mencerminkan tingginya aktivitas ekspor komoditas perikanan. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi metode pengujian laboratorium untuk mendeteksi HPIK lebih cepat, serta penguatan kerja sama dengan eksportir guna memastikan pemenuhan standar sanitasi dan fitosanitasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dalam inspeksi dan pengawasan turut berperan dalam memastikan bahwa produk perikanan yang diekspor memenuhi persyaratan karantina. Untuk lebih meningkatkan capaian di masa depan, langkah yang dapat diterapkan antara lain pengembangan sistem e-certification untuk sertifikasi ekspor perikanan, penerapan sensor otomatis untuk mendeteksi penyakit ikan sebelum pengiriman, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas karantina negara tujuan ekspor.

Sementara itu, Karantina Tumbuhan (KT) mencatat realisasi tertinggi dengan 20.857 sertifikat ekspor, menegaskan dominasi sektor ini dalam aktivitas ekspor media pembawa. Keberhasilan ini didorong oleh penerapan sistem inspeksi berbasis risiko yang memungkinkan efisiensi dalam pemeriksaan media pembawa

tumbuhan, peningkatan kapasitas laboratorium dalam pengujian OPTK, serta kerja sama erat dengan eksportir untuk memenuhi standar internasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti drone dan citra satelit dalam pemantauan lahan pertanian turut berkontribusi dalam mendukung sertifikasi ekspor yang lebih akurat dan efisien. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem digitalisasi perizinan ekspor, peningkatan fasilitas laboratorium khusus fitosanitari di pelabuhan ekspor utama, serta penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap produk yang tidak memenuhi standar karantina.

- c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor kunci adalah peningkatan efektivitas pengawasan di titik-titik pengeluaran dengan penerapan sistem berbasis risiko yang lebih ketat. Selain itu, adanya peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan serta bandara telah mempermudah proses pengawasan dan sertifikasi media pembawa. Digitalisasi layanan juga menjadi faktor pendukung, di mana penggunaan sistem online dalam pengelolaan sertifikasi membantu mempercepat proses verifikasi dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi. Selain faktor teknis, keberhasilan ini juga didukung oleh upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi karantina. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada eksportir mengenai persyaratan dan prosedur karantina telah meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan standar kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan. Langkah alternatif yang diterapkan untuk memastikan target tercapai mencakup optimalisasi layanan pemeriksaan di luar jam operasional, peningkatan kapasitas laboratorium uji, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap media pembawa yang akan dikirim ke luar wilayah.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah sertifikasi ekspor menunjukkan efektivitas kebijakan dan sistem pengawasan karantina dalam memastikan bahwa komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang diekspor telah memenuhi standar

kesehatan dan keamanan hayati. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global tetapi juga memperkuat ketahanan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan infrastruktur laboratorium, serta penguatan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan sistem karantina ekspor yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian IKU 4 ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dilakukan. Program peningkatan pengawasan di titik pengeluaran telah berhasil memastikan bahwa media pembawa yang diekspor telah memenuhi persyaratan karantina dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, program percepatan layanan sertifikasi berbasis digital telah membantu mengurangi waktu tunggu dalam proses penerbitan sertifikat. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan kepada petugas karantina dan pelaku usaha juga turut mendukung pencapaian target dengan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan pencapaian yang melampaui target ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan hayati serta mendukung kelancaran arus perdagangan yang sesuai dengan standar karantina. Ke depan, evaluasi dan inovasi dalam sistem pengawasan serta pelayanan akan terus dilakukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan karantina di tempat pengeluaran.

5) IKU 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Jumlah pihak ketiga yang diregistrasi sebagai pelaksana tindakan Karantina dalam melayani tempat lain yang memenuhi persyaratan karantina pihak ketiga yang

mengajukan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT .

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU. 5

Indikator Kinerja	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	%
Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60	116	193,33

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam registrasi pihak lain yang melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 60 dokumen, sementara realisasi yang dicapai mencapai 116 dokumen atau setara dengan 193,33% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor kunci adalah peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, fasilitas penyedia layanan karantina, serta institusi terkait. Peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi karantina mendorong lebih banyak pihak untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan legalitas dalam melakukan tindakan karantina. Selain itu, penyederhanaan prosedur registrasi melalui sistem digital juga berperan dalam mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran, sehingga lebih banyak pihak dapat memenuhi persyaratan dengan lebih efisien.

Beberapa langkah strategis telah diterapkan untuk mendukung pencapaian ini. Di antaranya adalah optimalisasi layanan berbasis digital yang memungkinkan proses registrasi dilakukan secara daring, serta peningkatan kapasitas tim verifikasi dan evaluasi untuk mempercepat validasi dokumen. Selain itu, Balai Karantina juga telah melakukan kerja sama dengan asosiasi industri dan sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam memenuhi standar karantina. Alternatif solusi lain yang diterapkan mencakup bimbingan teknis kepada calon

pendaftar, penyelenggaraan workshop terkait regulasi karantina, serta pemberian asistensi dalam pemenuhan persyaratan administrasi.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU 5 ini juga didukung oleh program strategis seperti intensifikasi pengawasan dan evaluasi terhadap pihak yang telah diregistrasi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, peningkatan sistem manajemen data registrasi yang lebih terintegrasi telah membantu dalam monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data. Program peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan verifikasi juga memberikan kontribusi penting dalam mempercepat proses registrasi tanpa mengurangi ketelitian dan akurasi penilaian.

Dengan capaian yang melampaui target ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pihak lain yang terlibat dalam tindakan karantina. Ke depan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas registrasi akan terus dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, serta pengembangan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 14 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2024 (Dokumen)	Capaian (%)
Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	N/A	116	193,33

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2024, jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di Balai Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah mencapai 116 dokumen, dengan capaian 193,33% dari target yang ditetapkan. Peningkatan signifikan ini menunjukkan keberhasilan strategi registrasi pihak lain dalam memperluas jaringan kerja sama dengan pelaku usaha dan fasilitas terkait guna memperkuat sistem karantina di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2023, jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina belum tersedia (N/A) karena karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan jumlah pihak teregistrasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, optimalisasi digitalisasi proses registrasi telah mempercepat dan mempermudah proses verifikasi kelayakan pihak lain yang ingin terlibat dalam kegiatan karantina. Penerapan sistem berbasis digital dan integrasi dengan platform layanan perizinan online memudahkan pemohon dalam mengajukan dan melengkapi dokumen registrasi tanpa harus datang langsung ke kantor karantina. Kedua, peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholders* juga berkontribusi besar dalam capaian ini. Sosialisasi aktif kepada perusahaan logistik, eksportir, importir, dan fasilitas penyimpanan terkait persyaratan dan manfaat registrasi sebagai mitra dalam tindakan karantina meningkatkan partisipasi mereka. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait, asosiasi industri, serta pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan semakin memperkuat pemahaman akan pentingnya registrasi untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi karantina.

Ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Penerapan kebijakan yang lebih ketat terkait persyaratan registrasi serta pengawasan terhadap pihak yang telah terdaftar memastikan kepatuhan terhadap standar karantina. Evaluasi berkala terhadap fasilitas yang terdaftar

dilakukan guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar tindakan karantina.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian ini dapat dianalisis berdasarkan masing-masing divisi di BKHIT Jawa Tengah. Dalam sektor Karantina Hewan (KH), peningkatan jumlah pihak terdaftar didorong oleh optimalisasi fasilitas karantina bagi eksportir dan importir produk hewan. Penguatan inspeksi terhadap rumah potong hewan (RPH), peternakan, serta fasilitas *cold storage* yang kini lebih banyak terlibat dalam sistem karantina melalui proses registrasi turut meningkatkan jumlah pendaftar. Pada sektor Karantina Ikan (KI), kenaikan registrasi pihak lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap fasilitas pemrosesan dan penyimpanan hasil perikanan yang memenuhi standar sanitasi dan karantina. Kemitraan strategis dengan eksportir ikan dan hasil laut juga berkontribusi dalam memenuhi persyaratan karantina untuk perdagangan internasional. Sementara itu, sektor Karantina Tumbuhan (KT) mencatat peningkatan terbesar dalam jumlah registrasi pihak lain, terutama dari perusahaan logistik, gudang penyimpanan komoditas pertanian, dan eksportir produk hortikultura. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kapasitas fasilitas fumigasi dan perlakuan karantina yang semakin banyak digunakan oleh pihak swasta untuk memastikan komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebelum dikirim ke luar negeri.

Untuk mempertahankan tren positif ini serta mendorong peningkatan registrasi di tahun-tahun mendatang, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Salah satunya adalah penyempurnaan sistem digitalisasi melalui pengembangan platform berbasis AI yang dapat mempercepat proses verifikasi dokumen dan inspeksi awal secara otomatis. Selain itu, meningkatkan insentif bagi pihak terregistrasi, seperti percepatan layanan atau tarif khusus bagi mitra yang memiliki kepatuhan tinggi terhadap regulasi karantina, dapat menjadi dorongan tambahan bagi pelaku usaha untuk bergabung dalam sistem ini. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta, terutama dengan perusahaan eksportir dan distributor, juga berpotensi mendukung penguatan standar karantina nasional. Tak kalah penting,

evaluasi dan pengawasan lebih ketat dengan sistem audit berkala terhadap pihak terdaftar harus dilakukan guna memastikan sarana dan prasarana yang mereka sediakan tetap memenuhi standar tindakan karantina.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, BKHIT Jawa Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan keterlibatan mitra dalam sistem karantina. Hal ini akan mendukung pengawasan terhadap media pembawa secara lebih efektif, meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

6. IKU 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Jumlah pihak ketiga yang mengajukan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT

Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU. 6

Indikator Kinerja	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	%
Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	60	138	230

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau penyedia sarana untuk tindakan karantina. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 60 dokumen, sementara realisasi yang dicapai mencapai 138 dokumen atau 230% dari target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 16 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2024 (Dokumen)	Capaian (%)
Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain)	N/A	138	230

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2024, jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah mencapai 138 dokumen, dengan capaian 230% dari target yang ditetapkan. Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas strategi registrasi pihak lain dalam memperluas kerja sama dengan sektor swasta guna memperkuat sistem pengawasan karantina di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2023, jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina belum tersedia (N/A) karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak dalam memenuhi regulasi karantina, seiring dengan semakin ketatnya standar kepatuhan yang diterapkan. Upaya sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku

usaha dan pihak penyedia sarana karantina juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan permohonan registrasi. Selain itu, penyederhanaan dan percepatan proses administrasi melalui sistem digital telah membantu mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara lebih efisien.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama. Pertama, optimalisasi sistem administrasi dan digitalisasi layanan telah mempermudah dan mempercepat proses registrasi. Dengan penerapan sistem berbasis elektronik, pihak yang ingin mendaftar sebagai mitra karantina dapat mengajukan permohonan secara lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen. Kedua, peningkatan sosialisasi dan kerja sama dengan stakeholders turut berkontribusi dalam mendorong kenaikan jumlah pendaftar. Melalui berbagai forum, seminar, dan pelatihan, BKHIT Jawa Tengah aktif memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan terhadap regulasi karantina serta manfaat dari registrasi sebagai mitra resmi.

Selain itu, penguatan kebijakan dan pengawasan regulasi juga menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah pihak yang memenuhi persyaratan administrasi. Penerapan standar ketat dalam seleksi calon mitra serta evaluasi berkala terhadap pihak yang telah terdaftar memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dapat menjadi bagian dari sistem karantina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjamin bahwa fasilitas yang digunakan dalam tindakan karantina telah memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan.

Jika dilihat dari masing-masing divisi di BKHIT Jawa Tengah, terdapat peningkatan yang merata dalam registrasi pihak lain. Pada sektor Karantina Hewan (KH), peningkatan registrasi terutama berasal dari fasilitas peternakan, rumah potong hewan (RPH), serta perusahaan yang bergerak dalam distribusi produk hewan yang ingin memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan hewan. Sementara itu, dalam sektor Karantina Ikan (KI), lonjakan registrasi terjadi

pada fasilitas pemrosesan dan penyimpanan hasil perikanan, terutama dari eksportir dan pelaku usaha di bidang perikanan budidaya yang ingin memperoleh sertifikasi karantina untuk memperluas akses pasar. Di sektor Karantina Tumbuhan (KT), peningkatan terbesar berasal dari registrasi fasilitas penyimpanan, gudang logistik, dan eksportir hasil pertanian yang membutuhkan sertifikasi guna memastikan produknya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebelum dikirim ke pasar domestik maupun internasional.

- d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Beberapa langkah strategis yang diterapkan untuk menunjang pencapaian ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pemohon registrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses verifikasi dokumen, serta pengoptimalan sistem informasi dalam pengelolaan data registrasi. Alternatif solusi lain yang diterapkan meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis dan asistensi kepada pihak yang ingin mengajukan permohonan, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKU 6 ini juga tidak terlepas dari program strategis yang mendukung, seperti integrasi sistem layanan registrasi dengan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kerja sama dengan asosiasi industri dalam mendorong kepatuhan regulasi di sektor terkait. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses registrasi dan persyaratan administrasi terus dilakukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi sistem yang telah diterapkan.

Dengan pencapaian yang melampaui target ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan standar pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi karantina. Ke depan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas registrasi akan terus dilakukan melalui penguatan kebijakan, optimalisasi layanan berbasis teknologi,

serta pengembangan program edukasi bagi pemangku kepentingan guna memastikan sistem karantina yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, BKHIT Jawa Tengah perlu terus mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan tren positif ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain penyempurnaan sistem digitalisasi registrasi dengan integrasi sistem yang lebih canggih, pemberian insentif bagi mitra yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan asosiasi industri guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam sistem karantina. Selain itu, evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pihak yang telah terdaftar harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat tetap memenuhi standar administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Dengan implementasi strategi yang tepat, BKHIT Jawa Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan keterlibatan mitra dalam sistem karantina, memperkuat pengawasan terhadap media pembawa, serta mendukung ketahanan pangan nasional dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

7) IKU 7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU. 7

Indikator Kinerja	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	%
Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	0	0	100

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang sedang ditangani Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil

Penyidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya penyidik melimpahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah kasus yang terjadi sampai tahun 2024 dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori pro-justisi dan ditangani oleh PPNS Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah mur.

Berdasarkan data dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 menunjukkan tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan yang optimal. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 0 kasus, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0 kasus, sehingga tingkat pencapaian tetap 100%.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 18 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2024 (Dokumen)	Capaian (%)
Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	N/A	0	100

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) belum tersedia (N/A) karena masih dalam masa transisi menuju Badan Karantina Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi menunjukkan bahwa tidak ada kasus pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti hingga tahap penyelesaian (0 kasus), dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai target ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan pencegahan yang telah diterapkan dalam sistem karantina. Salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta pihak yang terlibat dalam proses karantina terhadap regulasi yang berlaku. Upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai ketentuan hukum dan prosedur perkarantinaan telah mendorong pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi. Selain itu, penerapan sistem pemantauan yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pelacakan dokumen dan aktivitas perkarantinaan, juga berperan dalam meminimalisir risiko ketidaksesuaian.

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan keberhasilan ini, di antaranya adalah penguatan koordinasi antara Balai Karantina dengan instansi penegak hukum, peningkatan transparansi dalam prosedur perizinan, serta optimalisasi mekanisme audit dan inspeksi di lapangan. Alternatif solusi lain yang diterapkan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek pengawasan dan investigasi, serta penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*) guna mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi kasus hukum.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain peningkatan pengawasan di tempat pemasukan dan pengeluaran, optimalisasi sistem deteksi dini, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU 7 ini mencakup implementasi regulasi yang lebih ketat terhadap pihak yang mengajukan

permohonan registrasi, peningkatan layanan berbasis digital untuk memastikan kepatuhan administrasi, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih cepat dan responsif. Dengan adanya sinergi antara penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pemangku kepentingan, risiko pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan perkarantinaan. Ke depan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus mengoptimalkan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan, guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas layanan karantina secara keseluruhan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat juga berperan dalam menekan potensi pelanggaran. Kampanye mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi karantina, baik melalui media digital maupun langsung di lapangan, telah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pihak terkait.

Ke depan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, Balai Karantina akan terus memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas SDM dalam deteksi dan penanganan pelanggaran, serta memperluas kerja sama lintas sektor guna memastikan regulasi perkarantinaan tetap ditegakkan secara optimal.

8) IKU 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat.

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU. 8

Indikator Kinerja	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	%
Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3	151	5.033,33

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan edukasi kepada masyarakat, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah menjalankan program strategis untuk mewujudkan layanan humas yang baik, salah satunya melalui publikasi informasi perkarantinaan. Berdasarkan data tahun anggaran 2024, indikator kinerja utama dalam program ini adalah jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat. Dengan target awal sebanyak 3 dokumen, realisasi yang dicapai mencapai 151 dokumen atau 5.033,33% dari target yang telah ditetapkan.

- b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 20 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Nilai)	Realisasi Tahun 2024 (Nilai)	Capaian (%)
Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	N/A	151	5.033,33

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2024, realisasi jumlah publikasi mencapai 151 publikasi, dengan capaian 5.033,33% dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perkarantinaan telah

mengalami perkembangan pesat, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Pada tahun 2023, jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina belum tersedia (N/A) karena karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia.

- c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Keberhasilan luar biasa ini didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya informasi perkarantinaan, baik dari sisi internal instansi maupun masyarakat umum. Kedua, pemanfaatan berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial, situs web resmi, serta kolaborasi dengan media massa, telah memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan cepat. Selain itu, adanya peningkatan dalam produksi materi publikasi, seperti infografis, artikel, video edukatif, dan buletin, juga berkontribusi terhadap lonjakan jumlah publikasi yang signifikan.

Untuk mencapai hasil ini, sejumlah strategi dan alternatif solusi telah diterapkan. Salah satunya adalah optimalisasi teknologi digital dalam mendistribusikan informasi, seperti penggunaan platform media sosial dan layanan berbasis daring untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan publikasi juga dilakukan guna memastikan kualitas konten yang informatif dan menarik.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian target, seperti kampanye edukasi publik secara berkala, penguatan kerja sama dengan komunitas dan asosiasi terkait, serta peningkatan partisipasi publik dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perkarantinaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya tersebar luas, tetapi juga mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan capaian yang jauh melampaui target, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam membangun layanan humas yang responsif dan efektif. Ke depan, upaya peningkatan kualitas publikasi akan terus dilakukan melalui diversifikasi metode komunikasi, penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi inovatif guna memastikan bahwa informasi perkarantinaaan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, penguatan strategi komunikasi publik, baik melalui media konvensional maupun digital, sehingga jangkauan informasi semakin luas. Kedua, optimalisasi pemanfaatan media sosial, website resmi, serta kerja sama dengan media massa untuk mempercepat penyebaran informasi terkait kebijakan dan prosedur perkarantinaaan. Ketiga, adanya peningkatan frekuensi kampanye edukasi dan sosialisasi, baik dalam bentuk seminar, webinar, maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian ini antara lain penguatan peran humas dalam mendukung transparansi informasi, pengembangan konten digital edukatif, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan komunitas terkait. Ke depan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus memperkuat strategi publikasi dengan inovasi berbasis teknologi informasi guna memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan terpercaya.

9) IKU 9. Terwujudnya Layanan Humas yang baik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Nilai IKM mencerminkan tingkat kualitas layanan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah yang dirasakan masyarakat. Nilai ini berdasarkan hasil survey IKM yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah Sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21 Perkembangan capaian IKU. 9

Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	84,88	104,79

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menjalankan program strategis untuk mewujudkan layanan humas yang baik. Salah satu indikator utama dalam program ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pada tahun anggaran 2024, target yang ditetapkan untuk IKM adalah 81, sementara realisasi yang berhasil dicapai mencapai 84,88, atau 104,79% dari target.

b. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Tabel 22 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Nilai)	Realisasi Tahun 2024 (Nilai)	Capaian (%)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	84,88	104,79

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum tersedia (N/A) karena masih dalam tahap transisi menuju pembentukan Badan Karantina Indonesia. Namun, pada tahun 2024, realisasi IKM mencapai 84,88, dengan capaian 104,79% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berada dalam kategori sangat baik dan terus mengalami peningkatan.

c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa faktor utama yang mendukung pencapaian ini antara lain peningkatan efektivitas komunikasi publik, optimalisasi layanan informasi, serta responsivitas dalam menangani keluhan dan pertanyaan masyarakat. Penerapan sistem layanan berbasis digital, seperti pengaduan daring dan konsultasi interaktif, juga menjadi salah satu langkah inovatif yang berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Keberhasilan peningkatan IKM ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kualitas layanan publik, termasuk responsivitas petugas dalam menangani permohonan layanan serta peningkatan efektivitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, penerapan sistem layanan berbasis digital, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perkarantina, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan transparansi proses layanan, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, yang memastikan bahwa petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan ramah kepada masyarakat.

Sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, Balai Karantina juga melakukan survei dan evaluasi berkala terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil dari survei ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kecepatan respons, dan penyediaan sarana informasi yang lebih mudah diakses.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian ini telah dilakukan, seperti peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan masyarakat, serta kampanye edukasi mengenai prosedur perkarantinaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, berbagai program dan kegiatan pendukung turut berperan dalam meningkatkan nilai IKM. Salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan informasi dan edukasi perkarantinaan, yang dilakukan melalui sosialisasi reguler, publikasi konten informatif di media sosial, serta penyuluhan langsung kepada pemangku kepentingan. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan kompetensi petugas layanan juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan layanan yang lebih profesional dan ramah masyarakat.

Ke depan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengembangkan sistem layanan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi, meningkatkan efektivitas komunikasi publik, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala guna memastikan pelayanan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan humas dengan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif, memperkuat inovasi dalam penyampaian informasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan layanan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan nilai IKM dapat terus meningkat, mencerminkan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap layanan.

10) IKU 10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah

Nilai Kinerja (NK) merupakan Penilaian Kinerja Keuangan Instansi pemerintah, Nilai ini didapatkan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 22/2021 Jo, 249/2011 Jo, 214/2017 tahun 2024 yaitu sebesar 94,65 sebagaimana Tabel 23.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sebesar 94,46 atau dengan capaian sebesar 116,62% dari target sebesar 81 sebagaimana Tabel 23. Nilai kinerja Anggaran itu berasal dari jumlah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 47,67 dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 46,79 sehingga diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 94,46. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah TA 2024 sebesar 94,46 dikategorikan Sangat Baik. Hal ini didukung oleh besarnya penyerapan anggaran sebesar 98,59%, juga karena konsistensi antara realisasi penarikan dana dan rencana penarikan dana bulanan Selain itu tingginya Nilai Kinerja Anggaran juga didukung oleh ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan belanja kontraktual, rendahnya dispensasi SPM, dan ketepatan pengelolaan UP dan TUP serta tingginya Capaian Rincian Output yang mencapai 100%.

Tabel 23 Perkembangan capaian IKU 10

Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	81	94,65	116,85

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah menjalankan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja anggaran. Salah satu indikator utama dalam program ini adalah Nilai Kinerja Anggaran, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran dalam mendukung operasional dan layanan perkarantinaaan. Pada tahun anggaran 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 81, sementara realisasi yang dicapai mencapai 94,46, atau 116,62% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, di antaranya optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih ketat dan efisien, serta peningkatan kapasitas SDM dalam

manajemen keuangan. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan, turut berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang optimal. Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintah juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah strategis, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi dan monitoring berkala terhadap realisasi anggaran, sehingga potensi inefisiensi dapat diidentifikasi dan diminimalkan sejak dini. Program digitalisasi sistem keuangan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi beberapa inisiatif yang berkontribusi pada peningkatan nilai kinerja anggaran.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari beberapa program dan kegiatan yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan, seperti peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan operasional dan program strategis yang telah direncanakan.

Untuk kedepannya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus meningkatkan kualitas layanan keuangan dengan mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern dan transparan. Upaya peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi berbasis digital, serta penguatan pengawasan internal akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja anggaran tetap berada pada tingkat yang optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2024
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan yang transparan, akuntabel,

dan efisien. Evaluasi terhadap kinerja anggaran dari tahun ke tahun menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisas. Berikut adalah hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 24 Perbandingan Perkembangan Capaian IKU 10

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Nilai)	Realisasi Tahun 2024 (Nilai)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	N/A	94,46	116,62%

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah belum ada karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia, sehingga Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur secara definitif (N/A). Namun, setelah proses adaptasi dan integrasi yang lebih baik, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi nilai kinerja anggaran mencapai 94,46, yang setara dengan 116,62% dari target yang ditetapkan.

- c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dilakukan. Penyempurnaan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor utama, dimana implementasi perencanaan berbasis kinerja yang lebih sistematis dan optimalisasi alokasi anggaran telah diterapkan sesuai dengan prioritas program strategis. Selain itu, efektivitas dalam pelaksanaan program

dan pengawasan keuangan juga berkontribusi besar, dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan serapan anggaran yang lebih optimal dan sesuai dengan perencanaan. Peningkatan koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan program kerja turut mendukung efisiensi pelaksanaan anggaran.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu faktor pendukung utama. Pemanfaatan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan anggaran telah meningkatkan transparansi dan akurasi, serta mempercepat proses administrasi keuangan. Di samping itu, penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pegawai agar lebih memahami regulasi baru pasca transisi ke Badan Karantina Indonesia. Peningkatan pemahaman terkait akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik turut mencegah penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

- d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini antara lain optimalisasi penggunaan anggaran untuk program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan karantina dan pengawasan perbatasan, penerapan standar pengelolaan anggaran berbasis prinsip *good governance*, serta integrasi sistem keuangan dalam struktur organisasi baru. evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran juga dilakukan guna mengidentifikasi hambatan dan menemukan solusi yang tepat agar anggaran dapat terserap secara maksimal.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2024. Upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam tata kelola keuangan akan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

11) IKU 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini mencerminkan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam upaya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Output dapat berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil penilaian Inspektorat Badan Karantina Indonesia.

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 sebesar 88,05 atau dengan capaian sebesar 108,70% dari target sebesar 81 sebagaimana Tabel 16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah TA. 2024 sebesar 88,05 dikategorikan Baik. Hal ini didukung oleh penerapan perencanaan berbasis kinerja yang lebih sistematis telah memungkinkan instansi untuk menetapkan sasaran strategis yang jelas serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, berbasis pada indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 25 Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	88,05	108,70

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

b. Perbandingan Target dan realisasi tahun sebelumnya

Tabel 26 Perbandingan Target dan realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (Nilai)	Realisasi Tahun 2024 (Nilai)	Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	N/A	88,05	108,70

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah belum ada karena masih dalam masa transisi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap dibawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dibawah Badan Karantina Indonesia, sehingga Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur secara definitif (N/A). Namun, setelah proses adaptasi dan integrasi yang lebih baik, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencapai 88,05, yang setara dengan 108,70% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pengelolaan anggaran serta perencanaan strategis yang lebih baik.

- c. Analisa penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Keberhasilan peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, yang memungkinkan setiap program dan kegiatan diarahkan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan prioritas organisasi. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, didukung oleh pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, sehingga setiap alokasi dana dapat dipantau dan dievaluasi secara *real-time*.

Optimalisasi dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja juga turut menjadi faktor keberhasilan. Pengalokasian sumber daya dilakukan secara lebih tepat sasaran, didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Implementasi sistem pelaporan yang lebih efektif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data turut mempercepat proses evaluasi kinerja dan meningkatkan efisiensi operasional.

- d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian ini meliputi penguatan sistem manajemen kinerja, penyempurnaan mekanisme pelaporan berbasis indikator kinerja utama (IKU), serta peningkatan koordinasi lintas unit dalam pengambilan kebijakan strategis. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kinerja agar pegawai memiliki pemahaman yang lebih baik terkait tata kelola yang akuntabel.

Selain itu, berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian ini juga telah dilaksanakan, seperti peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran, penyempurnaan mekanisme pelaporan berbasis indikator kinerja utama (IKU), serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keuangan. Upaya sinergis ini memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan pencapaian ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran di tahun-tahun mendatang. Fokus utama ke depan adalah optimalisasi efisiensi anggaran, peningkatan transparansi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Ke depan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah akan terus melakukan inovasi dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja guna mempertahankan serta meningkatkan standar akuntabilitas. Penerapan

teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, penguatan sinergi antar unit kerja, serta pengembangan metode evaluasi yang lebih komprehensif akan menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja yang optimal.

A. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 98,59%, Hal ini karena dilakukan evaluasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas dengan melakukan revisi POK atau revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana Tabel 27 dan rincian anggaran per kegiatan utama sebagaimana Tabel 28.

Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja TA 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	15.209.155.000	15.209.058.241	100	96.759
2	Belanja Barang	19.509.064.000	19.040.538.541	97,60	458.525.45
3	Belanja Modal	1.683.428.000	1.638.827.000	97,33	44.999.173
	Jumlah	36.401.647.000	35.888.025.609	98,59	513.621.39

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah melaksanakan realisasi anggaran dengan capaian 98,59% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp36.401.647.000. Dari total anggaran tersebut, masih terdapat sisa sebesar Rp513.621.391, yang mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta optimalisasi penggunaan anggaran di berbagai kategori belanja.

Secara rinci, Belanja Pegawai mendapatkan alokasi sebesar Rp15.209.155.000, dengan realisasi mencapai Rp15.209.058.241 atau 100% dari total pagu. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan, serta kewajiban pegawai telah terpenuhi secara optimal, dengan sisa anggaran yaitu Rp 96.759.

Untuk Belanja Barang, yang mencakup operasional kantor, pengadaan bahan habis pakai, serta kebutuhan pendukung lainnya, dialokasikan anggaran sebesar Rp19.509.064.000. Realisasi anggaran pada belanja barang mencapai

Rp19.040.538.541, dengan persentase serapan 97,60%, sehingga masih menyisakan anggaran sebesar Rp458.525.459. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, sekaligus adanya penghematan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, belanja modal untuk penambahan nilai gedung dan bangunan ataupun pembelian peralatan dan mesin serta sarana pendukung lainnya, memiliki pagu sebesar Rp1.683.428.000. Hingga akhir tahun, realisasi belanja modal ini mencapai Rp1.638.827.000, dengan tingkat penyerapan 97,33%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.999.173.

Secara keseluruhan, BK HIT Jawa Tengah telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, dengan tingkat serapan yang tinggi di seluruh kategori belanja. Sisa anggaran yang masih tersedia dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan di tahun mendatang, terutama dalam optimalisasi belanja barang dan belanja modal. Selanjutnya, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya guna memastikan bahwa setiap anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas dan fungsi utama dalam pengawasan serta tindakan karantina di wilayah Jawa Tengah.

Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja per Rincian Output 2024

Kode	Kegiatan	Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
HA.7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	8,821,014,000	8,316,682,440	94.28%
CAG.950	Sarana Karantina	1,313,428,000	1,269,637,000	96.67%
CBK .970	Prasarana Karantina	200,000,000	199,067,000	99.53%
PDC.501	Hasil Pemantauan	457,099,000	426,406,176	93.29%
PDC.502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	6,529,297,000	6,122,576,384	93.77%
QIA .601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran	321,190,000	298,995,880	93.09%

WA.6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	27,580,633,000	27,571,347,579	99.97%
EBA.956	Layanan BMN	10,000,000	9,868,500	98.69%
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan	60.170.000.00	58,678,103	97.52%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	50,000,000	49,793,654	99.59%
EBA.962	Layanan Umum	390,200,000	389,757,742	99.89%
EBA.994	Layanan Perkantoran	26,070,818,000	26,069,574,856	100%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	170,000,000	169,724,827	99.84%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	270,250,000	270,205,708	99.98%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	141,106,000	140,913,470	99.86%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	333,475,000	328,824,319	98.61%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	84,614,000	84,006,400	99.28%

Sumber: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, 2024

Pada tahun anggaran 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Dari total anggaran yang dialokasikan, sebagian besar kegiatan mencapai serapan anggaran di atas 93%, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan pencapaian target output yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan realisasi anggaran dan realisasi fisik per program dan kegiatan.

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina

Program Penyelenggaraan Layanan Karantina memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8.821.014.000, dengan realisasi mencapai Rp8.316.682.440 atau 94,28%. Beberapa komponen dalam program ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang optimal dengan penjelasan realisasi per kegiatan sebagai berikut:

- a. Sarana Karantina, dengan anggaran Rp1.313.428.000, telah terealisasi Rp1.269.637.000 (96,67%).
- b. Prasarana Karantina, dengan anggaran Rp200.000.000, mencapai realisasi Rp199.067.000 (99,53%).

- c. Hasil Pemantauan, yang memiliki anggaran Rp457.099.000, telah terealisasi sebesar Rp426.406.176 (93,29%) .
 - d. Sertifikasi Kesehatan/Karantina, yang memiliki anggaran Rp6.529.297.000, terealisasi sebesar Rp6.122.576.384 (93,77%).
 - e. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran, dengan alokasi Rp321.190.000, terealisasi Rp298.995.880 (93,09%).
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- Program Dukungan Manajemen dan Teknis Badan Karantina Indonesia mendapatkan anggaran Rp27.580.633.000, dengan realisasi Rp27.571.347.579 (99,97%), menunjukkan hampir seluruh anggaran telah terserap. Beberapa komponen dalam program ini juga menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang optimal dengan penjelasan realisasi per kegiatan sebagai berikut:
- a. Layanan BMN, dengan anggaran Rp10.000.000, terealisasi Rp9.868.500 (98,69%) .
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat, dengan alokasi Rp60.170.000, terealisasi Rp58.678.103 (97,52%) .
 - c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan anggaran Rp50.000.000, terealisasi Rp49.793.654 (99,59%).
 - d. Layanan Umum, yang mendapatkan alokasi Rp390.200.000, terealisasi sebesar Rp389.757.742 (99,89%).
 - e. Layanan Perkantoran, dengan alokasi terbesar dalam kategori ini yaitu Rp26.070.818.000, telah terealisasi 100%, yakni sebesar Rp26.069.574.856.
 - f. Layanan Sarana Internal, dengan anggaran Rp170.000.000, terealisasi Rp169.724.827 (99,84%).
 - g. Layanan Manajemen SDM, dengan anggaran Rp270.250.000, terealisasi Rp270.205.708 (99,98%).
 - h. Layanan Perencanaan dan Penganggaran, dengan anggaran Rp141.106.000, terealisasi Rp140.913.470 (99,86%).
 - i. Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan anggaran Rp333.475.000, terealisasi Rp328.824.319 (98,61%).

- j. Layanan Manajemen Keuangan, dengan anggaran Rp84.614.000, terealisasi Rp84.006.400 (99,28%).

Secara keseluruhan, BKHIT Jawa Tengah telah menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat baik di hampir seluruh kegiatan, dengan sebagian besar realisasi anggaran di atas 97%. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan program, baik dalam penyelenggaraan layanan karantina maupun dukungan manajemen dan teknis lainnya. Optimalisasi penggunaan anggaran ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan program tahun berikutnya agar tetap efisien dan tepat sasaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah tahun 2024 menyajikan gambaran pencapaian kinerja instansi tersebut berdasarkan target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKU). Laporan ini mencerminkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina, sekaligus mendukung prioritas nasional. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja secara kuantitatif, seluruh target indikator telah tercapai, bahkan beberapa melebihi sasaran. Dengan demikian, capaian kinerja Badan Karantina Indonesia dapat dikategorikan sebagai sangat berhasil.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 perlu dijaga, ditingkatkan, dan disempurnakan kualitasnya di tahun berikutnya. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menyusun rencana antisipasi dalam menghadapi kemungkinan *refocusing* dan penghematan anggaran di Badan Karantina Indonesia.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai agenda yang telah direncanakan tanpa menunda hal-hal yang dapat segera dilakukan.
3. Memprioritaskan kegiatan yang mendukung tugas, fungsi, serta target kinerja, dengan upaya agar tidak terkena *refocusing* atau penghematan anggaran.

Lampiran



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	15.209.155.000	15.209.058.241	100.00 %
52 Belanja Barang	19.509.064.000	19.040.538.541	97.60 %
53 Belanja Modal	1.683.428.000	1.638.428.827	97.33 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya



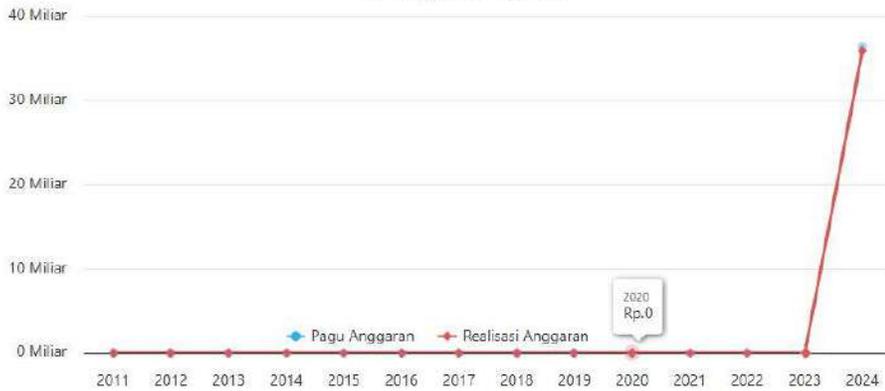
Desember

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

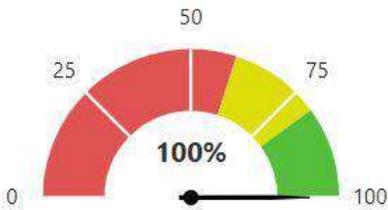


Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024



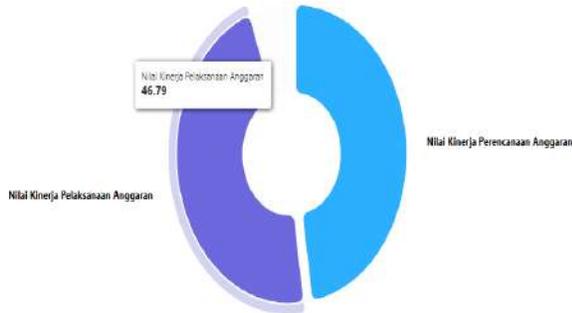
Progress Rincian Output



- Jumlah RO sebanyak 15 RO
- 15 RO sudah tercapai (progress = 100%)
 - 0 RO dalam proses (0 < progress < 100%)
 - 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan jawa tengah

Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik



Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik





BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINA BAHARI II LT. 7, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110. TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sokhib
Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Manaor Panggabean

Sokhib

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH

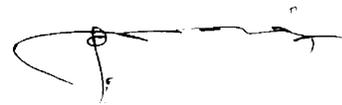
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27525 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25356 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	60 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	7.821.014.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	26.296.223.000
Total Anggaran	Rp.	34.117.237.000

Kepala Badan Karantina Pertanian

Sahat Manaor Panggabean

Jakarta, Februari 2024
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan Jawa Tengah



Sokhib



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	6999	PAGU REALISASI	15,209,155,000 15,209,058,241 (100.00%)	12,201,478,000 12,192,560,101 (99.93%)	170,000,000 169,724,827 (99.84%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	27,580,633,000 27,571,343,169 (99.97%)
		SISA	96,759	8,917,899	275,173	0	0	0	0	0	0	9,289,831
2	7003	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,307,586,000 6,847,978,440 (93.71%)	1,513,428,000 1,468,704,000 (97.04%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,821,014,000 8,316,682,440 (94.28%)
		SISA	0	459,607,560	44,724,000	0	0	0	0	0	0	504,331,560
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	15,209,155,000 15,209,058,241 (100.00%)	19,509,064,000 19,040,538,541 (97.60%)	1,683,428,000 1,638,428,827 (97.33%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	36,401,647,000 35,888,025,609 (98.59%)
		SISA	96,759	468,525,459	44,999,173	0	0	0	0	0	0	513,621,391

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 690881
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN KARANTINA INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
JAWA TENGAH
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/02/25 3:22 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 7/2/25 8:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,820,367,000	9,248,712,000	9,248,710,600	0	9,248,710,600	100	1,400
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87,000	138,000	136,402	4,410	131,992	95.65	6,008
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	459,305,000	701,028,000	701,026,590	0	701,026,590	100	1,410
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	141,222,000	227,878,000	227,876,034	0	227,876,034	100	1,966
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	31,400,000	31,400,000	0	31,400,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,324,957,000	1,401,496,000	1,401,496,000	0	1,401,496,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,427,000	101,477,000	101,475,488	0	101,475,488	100	1,512
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	367,822,000	527,580,000	527,579,700	0	527,579,700	100	300
511129	Belanja Uang Makan PNS	935,715,000	1,304,551,000	1,304,530,000	0	1,304,530,000	100	21,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	119,999,000	87,510,000	87,510,000	0	87,510,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	12,217,101,000	13,631,770,000	13,631,740,814	4,410	13,631,736,404	100	33,596
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	97,692,000	105,484,000	105,483,000	0	105,483,000	100	1,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	8,000	1,837	0	1,837	22.96	6,163
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,900,000	7,036,000	7,032,200	0	7,032,200	99.95	3,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,974,000	2,814,000	2,812,880	0	2,812,880	99.96	1,120
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,552,000	9,126,000	9,124,920	0	9,124,920	99.99	1,080
511628	Belanja Uang Makan PPPK	27,720,000	22,575,000	22,575,000	0	22,575,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	143,052,000	159,643,000	159,629,837	0	159,629,837	99.99	13,163
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,401,002,000	1,401,002,000	1,400,970,000	0	1,400,970,000	100	32,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	51,200,000	16,740,000	16,722,000	0	16,722,000	99.89	18,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,452,202,000	1,417,742,000	1,417,692,000	0	1,417,692,000	100	50,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,812,355,000	15,209,155,000	15,209,062,651	4,410	15,209,058,241	100	96,759
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,452,838,000	4,696,288,000	4,696,279,724	0	4,696,279,724	100	8,276
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	198,360,000	314,963,000	314,960,500	0	314,960,500	100	2,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	5,970,000	5,968,877	0	5,968,877	99.98	1,123
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	359,520,000	203,545,000	203,340,000	0	203,340,000	99.9	205,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,034,718,000	5,220,766,000	5,220,549,101	0	5,220,549,101	100	216,899

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 690881
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN KARANTINA INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
JAWA TENGAH
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/02/25 3:22 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 7/2/25 8:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	688,401,000	666,785,000	661,573,394	0	661,573,394	99.22	5,211,606
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	42,000,000	6,900,000	4,800,000	0	4,800,000	69.57	2,100,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	794,401,000	673,685,000	666,373,394	0	666,373,394	98.91	7,311,606
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	316,384,000	718,663,000	717,937,010	0	717,937,010	99.9	725,990
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	60,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	376,384,000	718,663,000	717,937,010	0	717,937,010	99.9	725,990
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	732,000,000	625,800,000	625,777,198	0	625,777,198	100	22,802
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	24,600,000	24,456,442	0	24,456,442	99.42	143,558
522113	Belanja Langganan Air	180,000,000	47,463,000	47,459,420	571,700	46,887,720	98.79	575,280
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	645,150,000	545,247,000	545,120,588	0	545,120,588	99.98	126,412
522141	Belanja Sewa	864,138,000	860,006,000	859,992,816	0	859,992,816	100	13,184
522151	Belanja Jasa Profesi	85,700,000	51,800,000	44,800,000	0	44,800,000	86.49	7,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,756,076,000	1,054,644,000	1,043,322,660	0	1,043,322,660	98.93	11,321,340
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,299,064,000	3,209,560,000	3,190,929,124	571,700	3,190,357,424	99.4	19,202,576
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	757,479,000	984,842,000	984,828,700	0	984,828,700	100	13,300
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,124,475,000	1,821,113,000	1,821,074,808	0	1,821,074,808	100	38,192
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	110,483,000	194,418,000	194,416,832	0	194,416,832	100	1,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,992,437,000	3,000,373,000	3,000,320,340	0	3,000,320,340	100	52,660
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,713,128,000	3,070,462,000	2,812,553,098	0	2,812,553,098	91.6	257,908,902
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,395,800,000	2,219,758,000	2,206,572,506	0	2,206,572,506	99.41	13,185,494
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	181,500,000	201,917,000	136,930,000	0	136,930,000	67.81	64,987,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102,250,000	149,850,000	132,258,800	0	132,258,800	88.26	17,591,200
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	573,300,000	1,044,030,000	956,686,868	0	956,686,868	91.63	87,343,132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,965,978,000	6,686,017,000	6,245,001,272	0	6,245,001,272	93.4	441,015,728
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	19,462,982,000	19,509,064,000	19,041,110,241	571,700	19,040,538,541	97.6	468,525,459
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471,900,000	1,433,428,000	1,389,469,827	0	1,389,469,827	96.93	43,958,173

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 690881
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN KARANTINA INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
JAWA TENGAH
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/02/25 3:22 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 7/2/25 8:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	170,000,000	50,000,000	49,892,000	0	49,892,000	99.78	108,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	641,900,000	1,483,428,000	1,439,361,827	0	1,439,361,827	97.03	44,066,173
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	199,067,000	0	199,067,000	99.53	933,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	200,000,000	200,000,000	199,067,000	0	199,067,000	99.53	933,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	841,900,000	1,683,428,000	1,638,428,827	0	1,638,428,827	97.33	44,999,173
	JUMLAH BELANJA	34,117,237,000	36,401,647,000	35,888,601,719	576,110	35,888,025,609	98.59	513,621,391